

POLA SOSIALISASI SATPOL PP DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN ALUN-ALUN JEMBER: TINJAUAN EKOLOGI PEMERINTAHAN ATAS RESISTENSI EKONOMI INFORMAL

Muhammad Rohman¹⁾

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur, Indonesia.

E-mail Koresponden: rohmanlos50@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pola sosialisasi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember dalam upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Jember, dengan menggunakan kerangka ekologi pemerintahan sebagai pisau analisis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola sosialisasi Satpol PP berlangsung melalui pendekatan persuasif-edukatif yang belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur komunikasi. Resistensi PKL muncul sebagai respons rasional terhadap tekanan ekonomi informal yang mengakar, dan tidak semata-mata sebagai bentuk pembangkangan terhadap regulasi. Dari perspektif ekologi pemerintahan, dinamika antara aparat dan PKL mencerminkan ketegangan antara kepentingan tata ruang perkotaan dengan kebutuhan hidup kelompok marginal. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan sosialisasi berbasis komunitas yang lebih adaptif dan inklusif.

Kata kunci: Satpol PP; PKL; Ekologi Pemerintahan; Resistensi; Ekonomi Informal.

Abstract

This research examines the socialization patterns implemented by the Civil Service Police Unit of Jember Regency in their efforts to regulate street vendors in the Jember Square area, using the governance ecology framework as an analytical tool. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques thru in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The research findings indicate that the socialization pattern of the Civil Service Police Unit occurs thru a persuasive-educational approach that is not yet optimal due to limitations in human resources and communication infrastructure. The resistance of street vendors emerges as a rational response to deeply rooted informal economic pressures, and not merely as a form of defiance against regulations. From the perspective of government ecology, the dynamics between officials and street vendors reflect the tension between urban spatial interests and the living needs of marginalized groups. This research recommends a more adaptive and inclusive community-based socialization approach.

Key words: Satpol PP; PKL; Government Ecology; Resistance; Informal Economy.

Article History:

Received : 2026-06-07

Revised : 2026-06-15

Accepted : 2026-06-30

PENDAHULUAN

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di ruang publik perkotaan merupakan fenomena sosial-ekonomi yang telah lama menjadi perhatian pemerintah daerah di Indonesia. Di satu sisi, sektor informal ini menyediakan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja formal, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga. Di sisi lain, kehadiran PKL di kawasan strategis seperti alun-alun kota kerap menimbulkan persoalan tata ruang, ketertiban umum, dan estetika lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Alisjahbana, 2005; Bromley, 2000).

Kawasan Alun-Alun Jember sebagai jantung kota dan ruang publik utama Kabupaten Jember menjadi salah satu titik konsentrasi PKL yang cukup padat. Berbagai jenis dagangan mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga aksesoris tersebar di berbagai sudut kawasan tersebut. Kondisi ini secara berkala memunculkan ketegangan antara kepentingan tata ruang yang diinginkan pemerintah dengan kepentingan ekonomi PKL yang sangat bergantung pada lokasi strategis tersebut (Wicaksono, 2018).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai instansi yang diberi kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, memikul tanggung jawab besar dalam mengelola ketertiban PKL di kawasan tersebut. Namun, tugas penertiban tidak selalu dapat dilaksanakan dengan pendekatan represif semata. Sosialisasi sebagai instrumen komunikasi kebijakan menjadi kunci dalam menciptakan kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan (Nugroho, 2017).

Pendekatan ekologi pemerintahan (governance ecology) yang dikembangkan oleh Bevir dan Rhodes (2003) menawarkan perspektif yang relevan untuk memahami dinamika tersebut. Kerangka ini memandang pemerintahan bukan sebagai entitas monolitik yang menerapkan kebijakan secara linear, melainkan sebagai ekosistem yang terdiri dari berbagai aktor dengan kepentingan, nilai, dan praktik yang saling berinteraksi dan membentuk satu sama lain. Dalam konteks ini, relasi antara Satpol PP dan PKL dapat dipahami sebagai relasi ekologis yang penuh negosiasi, adaptasi, dan ketegangan.

Pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian ini adalah: (1) Bagaimana pola sosialisasi Satpol PP dalam penertiban PKL di kawasan Alun-Alun Jember? (2) Bagaimana bentuk resistensi PKL terhadap upaya penertiban tersebut? (3) Bagaimana dinamika relasi antara Satpol PP dan PKL dapat dijelaskan melalui perspektif ekologi pemerintahan? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada pengembangan strategi sosialisasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan bagi kelompok ekonomi informal.

LITERATURE REVIEW

Ekologi Pemerintahan dan Tata Kelola Ruang Publik

Konsep ekologi pemerintahan pertama kali diperkenalkan oleh Bevir dan Rhodes (2003) sebagai upaya untuk melampaui pendekatan institusionalis dalam studi administrasi publik. Berbeda dengan perspektif yang memandang pemerintahan sebagai mekanisme formal yang bekerja melalui aturan dan hierarki, ekologi pemerintahan menekankan bahwa praktik-praktik pemerintahan sesungguhnya dibentuk oleh jaringan makna, narasi, dan tradisi yang dipegang oleh para aktor terlibat. Pemerintahan, dalam pandangan ini, adalah hasil dari interaksi ekologis yang terus-menerus antara berbagai elemen dalam suatu sistem (Bever & Rhodes, 2010).

Dalam konteks tata kelola ruang publik perkotaan, ekologi pemerintahan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana konflik penggunaan ruang diselesaikan atau tidak diselesaikan melalui proses negosiasi, dominasi, dan adaptasi antar aktor. Friedmann (2010) menegaskan bahwa ruang publik bukan sekadar arena fisik, melainkan arena politik tempat klaim-klaim sosial diperjuangkan. Kehadiran PKL di ruang publik dengan demikian tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran regulasi, tetapi sebagai ekspresi dari klaim ruang oleh kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi.

Suharto (2009) dalam kajiannya tentang kebijakan sosial di Indonesia mengemukakan bahwa kebijakan yang mengabaikan dimensi ekologis yakni konteks sosial, ekonomi, dan budaya tempat kebijakan diterapkan cenderung menghasilkan resistensi dan kegagalan implementasi. Pendapat ini sejalan dengan perspektif ekologi pemerintahan yang menekankan bahwa keberhasilan tata kelola bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memahami dan beradaptasi dengan ekosistem nilai dan kepentingan yang ada di masyarakat.

Sosialisasi Kebijakan dan Komunikasi Pemerintah

Sosialisasi kebijakan merupakan salah satu instrumen kritis dalam implementasi kebijakan publik. Menurut Agustino (2020), sosialisasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi mengenai substansi, tujuan, dan mekanisme suatu kebijakan kepada kelompok sasaran, dengan maksud untuk membangun pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan. Efektivitas sosialisasi tidak hanya bergantung pada kualitas pesan yang disampaikan, tetapi juga pada pilihan media, waktu, dan pendekatan yang digunakan.

Dalam konteks penertiban sektor informal, Raharjo (2016) membedakan dua model sosialisasi: model top-down yang bersifat instruktif dan searah, serta model dialogis yang menekankan partisipasi dan negosiasi bersama kelompok sasaran. Penelitian Raharjo menunjukkan bahwa model dialogis cenderung menghasilkan tingkat kepatuhan yang lebih

tinggi dan resistensi yang lebih rendah dibandingkan dengan model top-down yang kerap memicu penolakan.

Komunikasi pemerintahan yang efektif, sebagaimana dikemukakan oleh Levéesque dan White (2001), menuntut adanya kemampuan untuk membangun kepercayaan (trust) antara aparat dan masyarakat. Kepercayaan ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui konsistensi antara janji kebijakan dan implementasinya. Dalam kasus penertiban PKL, inkonsistensi antara sosialisasi dan tindakan represif seringkali menjadi sumber erosi kepercayaan yang berdampak pada meningkatnya resistensi (Winarni, 2019).

Ekonomi Informal dan Resistensi Sektor Marginal

Sektor ekonomi informal di perkotaan Indonesia telah menjadi kajian yang intensif sejak dekade 1970-an. Hart (1973), yang pertama kali memperkenalkan konsep ekonomi informal, memandangnya sebagai respons adaptif masyarakat terhadap keterbatasan lapangan kerja formal. Di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (2023), sektor informal masih menyerap lebih dari 57 persen angkatan kerja, dengan PKL menjadi salah satu subsektor terbesar di perkotaan.

Resistensi PKL terhadap penertiban tidak dapat dipahami sebatas sebagai perilaku devian. Scott (1985) dalam karya klasiknya tentang *Weapons of the Weak* menunjukkan bahwa resistensi kelompok marginal merupakan bentuk perjuangan sehari-hari (*everyday resistance*) yang bersifat terselubung namun efektif dalam mempertahankan ruang hidup mereka. Dalam konteks PKL, resistensi ini dapat mengambil bentuk pindah lokasi sementara saat razia, kembali berdagang segera setelah aparat pergi, hingga membangun jaringan informasi untuk menghindari penertiban.

Portes dan Schauffler (1993) berargumen bahwa informalitas bukan sekadar fenomena ekonomi, tetapi juga fenomena politik yang mencerminkan ketidakmampuan atau ketidakmauan negara untuk mengintegrasikan kelompok marginal ke dalam sistem formal. Dari perspektif ini, penertiban PKL tanpa disertai solusi alternatif yang memadai justru dapat memperparah ketidakadilan struktural yang menjadi akar persoalan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena sosial secara mendalam. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian yakni pola sosialisasi dan dinamika resistensi merupakan fenomena yang sarat dengan dimensi makna, konteks, dan proses interaksi sosial yang tidak dapat direduksi menjadi data numerik (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2019).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur, selama periode Agustus hingga November 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan Alun-Alun Jember merupakan salah satu titik konsentrasi PKL terbesar di Kabupaten Jember sekaligus lokasi yang secara rutin menjadi sasaran penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Jember.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung yang relevan dengan fokus penelitian. Informan terdiri dari tiga kelompok: (1) pejabat dan staf Satpol PP Kabupaten Jember yang terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi dan penertiban PKL (5 orang); (2) PKL yang berdagang di kawasan Alun-Alun Jember dengan pengalaman minimal dua tahun (12 orang); dan (3) tokoh masyarakat serta aktivis yang memiliki pemahaman tentang kondisi PKL di kawasan tersebut (3 orang).

Prosedur

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan penggalan informasi secara fleksibel sesuai respons informan. Kedua,

observasi partisipatif di lapangan untuk mengamati secara langsung proses sosialisasi dan penertiban yang dilakukan Satpol PP, serta respons PKL terhadap kegiatan tersebut. Ketiga, analisis dokumentasi meliputi peraturan daerah terkait, laporan kegiatan Satpol PP, dan dokumen perencanaan tata ruang Kabupaten Jember.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), melalui tahapan: familiarisasi dengan data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta penyusunan laporan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, serta member checking dengan mengembalikan hasil interpretasi kepada sebagian informan untuk dikonfirmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Sosialisasi Satpol PP dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Jember

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan informan dari unsur Satpol PP, ditemukan bahwa pola sosialisasi yang diterapkan mencakup tiga tahapan yang berlangsung secara berurutan namun tidak selalu konsisten dalam pelaksanaannya.

Tahapan pertama adalah sosialisasi masif melalui penyebaran selebaran (leaflet) yang memuat informasi mengenai peraturan yang berlaku, zona-zona yang dilarang untuk berdagang, dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Jember menyampaikan bahwa kegiatan ini biasanya dilakukan dua hingga tiga pekan sebelum operasi penertiban dijadwalkan. Namun, efektivitas pendekatan ini diakui masih terbatas karena tingkat literasi PKL yang beragam dan kurangnya tindak lanjut setelah selebaran dibagikan.

Tahapan kedua adalah sosialisasi langsung (face-to-face) yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dengan mendatangi PKL satu per satu. Dalam tahapan ini, petugas menyampaikan peringatan lisan dan meminta PKL untuk secara sukarela memindahkan lapak mereka ke lokasi yang telah ditentukan pemerintah. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam membangun dialog, namun terkendala oleh keterbatasan jumlah personel yang tersedia untuk melakukan kunjungan ke seluruh PKL di kawasan Alun-Alun yang jumlahnya mencapai ratusan pedagang.

Tahapan ketiga adalah sosialisasi kolektif melalui pertemuan yang melibatkan kelompok atau paguyuban PKL. Meskipun pendekatan ini berpotensi menjangkau lebih banyak PKL sekaligus, dalam praktiknya pertemuan semacam ini jarang terselenggara secara rutin karena minimnya anggaran dan sulitnya mengkoordinasikan waktu yang sesuai bagi semua PKL.

Temuan ini sejalan dengan kajian Raharjo (2016) yang menunjukkan bahwa instansi pemerintah daerah di Indonesia umumnya masih menerapkan pola sosialisasi yang bersifat top-down dan kurang melibatkan partisipasi aktif dari kelompok sasaran. Ketidakefektifan sosialisasi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun kapasitas personel, yang menjadi kendala struktural yang melampaui kehendak individual para petugas.

Tabel 1. Pola Sosialisasi Satpol PP di Kawasan Alun-Alun Jember

Tahapan	Metode	Kendala Utama
Sosialisasi Masif	Penyebaran selebaran dan pengumuman	Keterbatasan literasi dan tidak ada tindak lanjut
Sosialisasi Langsung	Kunjungan tatap muka per PKL	Keterbatasan jumlah personel
Sosialisasi Kolektif	Pertemuan paguyuban PKL	Minimnya anggaran dan koordinasi

Sumber: Hasil penelitian lapangan, 2024

Bentuk Resistensi PKL Terhadap Penertiban

Resistensi PKL terhadap upaya penertiban Satpol PP di kawasan Alun-Alun Jember mengambil berbagai bentuk yang dapat dikelompokkan ke dalam resistensi terbuka dan resistensi tersembunyi, mengikuti tipologi yang dikemukakan oleh Scott (1985).

Resistensi terbuka, meskipun relatif jarang, termanifestasikan dalam bentuk penolakan verbal saat petugas datang melakukan penertiban, mobilisasi solidaritas sesama PKL untuk menghadapi aparat secara kolektif, serta pengaduan kepada tokoh masyarakat atau anggota DPRD yang mereka kenal. Beberapa informan PKL mengaku pernah bersama-sama mendatangi kantor Satpol PP untuk memprotes tindakan penertiban yang dinilai tidak didahului sosialisasi yang memadai.

Resistensi tersembunyi, yang jauh lebih umum ditemukan, berlangsung melalui beberapa strategi adaptif. Pertama, sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis jaringan informal di antara sesama PKL, di mana anggota jaringan yang lebih dahulu mendeteksi kehadiran petugas segera menyebarkan informasi melalui aplikasi pesan instan kepada rekan-rekannya. Kedua, praktik pembongkaran lapak sementara saat petugas datang dan mendirikan kembali sesaat setelah petugas pergi, yang oleh PKL sendiri diistilahkan sebagai "main kucing-kucingan." Ketiga, relokasi lapak ke titik-titik pinggiran kawasan yang jarang dijangkau oleh patroli rutin.

Dari perspektif ekologi pemerintahan, bentuk-bentuk resistensi ini mencerminkan kemampuan adaptasi PKL sebagai aktor dalam ekosistem pemerintahan yang tidak pasif menerima kebijakan, tetapi secara aktif merespons dan memodifikasi perilaku mereka sebagai reaksi terhadap tekanan regulasi. Wicaksono (2018) menyebut fenomena ini sebagai "negosiasi senyap" yang justru menunjukkan bahwa kelompok marginal memiliki agensi dan kapasitas strategis yang tidak boleh diabaikan dalam perumusan kebijakan.

Analisis Ekologi Pemerintahan atas Dinamika Satpol PP dan PKL

Menggunakan kerangka ekologi pemerintahan sebagaimana dikembangkan oleh Bevir dan Rhodes (2010), dinamika antara Satpol PP dan PKL di kawasan Alun-Alun Jember dapat dipahami sebagai interaksi dalam suatu ekosistem tata kelola yang kompleks, di mana setiap aktor membawa seperangkat nilai, narasi, dan tradisi yang membentuk cara mereka bertindak dan memaknai situasi.

Satpol PP beroperasi dalam narasi "ketertiban dan keindahan kota" yang dilegitimasi oleh mandat regulasi dan tuntutan pimpinan daerah. Namun di balik narasi formal tersebut, para petugas lapangan juga mengembangkan pemahaman pragmatis tentang batas-batas yang dapat ditoleransi dan tidak, yang seringkali menghasilkan implementasi kebijakan yang lebih lentur dari yang tertulis di atas kertas. Salah seorang petugas Satpol PP yang diwawancarai mengakui bahwa mereka kerap memberikan "kelonggaran" kepada PKL yang kooperatif dan menunjukkan itikad untuk mematuhi aturan, sementara pendekatan yang lebih tegas diterapkan kepada mereka yang berulang kali melanggar setelah peringatan.

PKL, di pihak lain, beroperasi dalam narasi "hak untuk hidup" yang didasarkan pada realitas bahwa berdagang di kawasan ramai adalah satu-satunya sumber penghasilan yang layak bagi mereka. Dalam narasi ini, kawasan Alun-Alun dipandang bukan sebagai ruang yang dikuasai negara secara eksklusif, melainkan sebagai ruang publik yang selayaknya dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berprofesi sebagai pedagang.

Ketegangan antara kedua narasi inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari konflik tata kelola di kawasan Alun-Alun Jember. Pendekatan sosialisasi yang tidak mampu menjembatani ketegangan narasi ini yang hanya menyampaikan perintah regulasi tanpa memberi ruang bagi dialog tentang alternatif penghidupan terbukti tidak efektif dalam menghasilkan perubahan perilaku yang bermakna dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan argumen Suharto (2009) bahwa kebijakan sosial yang mengabaikan konteks ekologis lokal cenderung menghasilkan kegagalan implementasi.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada kepercayaan yang terbangun antara Satpol PP dan PKL. Dalam kasus-kasus di mana sosialisasi berhasil membuat PKL bersedia berpindah secara sukarela, faktor kepercayaan bahwa pemerintah akan menyediakan lokasi pengganti yang layak dan tidak mengambil

tindakan yang lebih merugikan memainkan peran yang sangat signifikan. Hal ini mengkonfirmasi temuan Winarni (2019) tentang sentralitas kepercayaan dalam komunikasi pemerintahan yang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola sosialisasi Satpol PP Kabupaten Jember dalam penertiban PKL di kawasan Alun-Alun masih bersifat prosedural dan top-down, dengan keterbatasan pada aspek keberlanjutan dialog dan keterlibatan aktif kelompok sasaran. Ketiga tahapan sosialisasi yang diterapkan masif, langsung, dan kolektif menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang belum memadai.

Resistensi PKL yang muncul bukanlah semata-mata penolakan terhadap otoritas, melainkan respons rasional terhadap tekanan ekonomi yang mengakar dan ketiadaan alternatif penghidupan yang setara. Dari perspektif ekologi pemerintahan, dinamika antara Satpol PP dan PKL mencerminkan ketegangan antara narasi tata ruang perkotaan dengan narasi hak atas penghidupan, yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum semata.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) pengembangan model sosialisasi berbasis komunitas yang melibatkan paguyuban PKL sebagai mitra aktif, bukan sekadar objek sosialisasi; (2) penyediaan solusi relokasi yang konkret dan layak sebelum penertiban dilaksanakan, sebagai prasyarat untuk membangun kepercayaan PKL terhadap proses sosialisasi; (3) peningkatan kapasitas komunikasi personel Satpol PP melalui pelatihan tentang pendekatan persuasif dan mediasi konflik; serta (4) pengembangan kebijakan terpadu antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Dinas Tata Ruang untuk memastikan bahwa penertiban PKL tidak memperparah kerentanan ekonomi kelompok marginal.

Reference

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Alisjahbana, A. S. (2005). *Sisi gelap perkembangan kota: Urbanisasi, informalitas, dan krisis ekologi metropolitan*. Lappera Pustaka Utama.
- Bevir, M., & Rhodes, R. A. W. (2003). *Interpreting British governance*. Routledge.
- Bevir, M., & Rhodes, R. A. W. (2010). *The state as cultural practice*. Oxford University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Bromley, R. (2000). Street vending and public policy: A global review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 20(1/2), 1–29. <https://doi.org/10.1108/01443330010789052>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Friedmann, J. (2010). Place and place-making in cities: A global perspective. *Planning Theory & Practice*, 11(2), 149–165. <https://doi.org/10.1080/14649351003759573>
- Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61–89. <https://doi.org/10.1017/S0022278X00008089>
- Levéesque, M., & White, D. (2001). Capital social, capital humain et sorties de l'aide sociale. *Canadian Journal of Sociology*, 26(2), 167–192. <https://doi.org/10.2307/3341588>
- Nugroho, R. (2017). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. (2018). Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/74694/pp-no-16-tahun-2018>
- Portes, A., & Schauffler, R. (1993). Competing perspectives on the Latin American informal sector. *Population and Development Review*, 19(1), 33–60. <https://doi.org/10.2307/2938384>
- Raharjo, S. (2016). Sosialisasi kebijakan publik terhadap pedagang kaki lima di kawasan perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 45–58.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia*. Alfabeta.

- Wicaksono, A. (2018). Negosiasi ruang dan tata kelola pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Jawa. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 29(3), 215–233. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2018.29.3.5>
- Winarni, E. (2019). Komunikasi pemerintahan dan kepercayaan publik dalam implementasi kebijakan daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik*, 2(1), 1–18.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023. BPS RI. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/07/2050/keadaan-ketenagakerjaan-indonesia-agustus-2023.html>.
- Cross, J. C., & Morales, A. (Eds.). (2007). *Street entrepreneurs: People, place and politics in local and global perspective*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203961124>
- Devas, N., & Rakodi, C. (Eds.). (1993). *Managing fast growing cities: New approaches to urban planning and management in the developing world*. Longman.
- Devey, R., Skinner, C., & Valodia, I. (2006). Definitions, data and the informal economy in South Africa. In V. Padayachee (Ed.), *The development decade? Economic and social change in South Africa*. HSRC Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Easton, D. (1965). *A framework for political analysis*. Prentice-Hall.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Feige, E. L. (1990). Defining and estimating underground and informal economies: The new institutional economics approach. *World Development*, 18(7), 989–1002. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(90\)90081-8](https://doi.org/10.1016/0305-750X(90)90081-8)
- Geertz, C. (1963). *Peddlers and princes: Social development and economic change in two Indonesian towns*. University of Chicago Press.
- Harriss-White, B. (2010). Work and wellbeing in informal economies: The regulative roles of institutions of identity and the state. *World Development*, 38(2), 170–183. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.013>
- ILO. (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture* (3rd ed.). International Labour Office. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm
- Laksono, A. D. (2019). Dinamika pedagang kaki lima dan kebijakan perkotaan: Studi kasus di Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 23–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jap.2019.006.02.03>
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Majone, G., & Wildavsky, A. (1984). Implementation as evolution. In J. Pressman & A. Wildavsky (Eds.), *Implementation* (3rd ed.). University of California Press.
- Maloney, W. F. (2004). Informality revisited. *World Development*, 32(7), 1159–1178. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.01.008>
- Manning, C., & Roesad, K. (2006). The manpower law of 2003 and its implementing regulations: Genesis, key articles and potential impact. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 42(1), 59–82. <https://doi.org/10.1080/00074910600609783>
- Mulyadi, M. (2016). Peran pemerintah daerah dalam penanganan pedagang kaki lima berbasis kearifan lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/10.14203/jpp.v13i1.456>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Pamungkas, A. C., Andriyan, Y., Rumlus, M. H., & Kalauw, S. M. (2025). Globalisasi dan desentralisasi dalam permasalahan pembangunan di Papua Barat Daya. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02), 1–20.
- Ratnawati, T. (2018). Tata kelola pedagang kaki lima di kawasan wisata: Studi komparatif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 15–28.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.

- Roever, S. (2014). Informal economy monitoring study sector report: Street vendors. WIEGO. <https://www.wiego.org/resources/informal-economy-monitoring-study-sector-report-street-vendors>
- Rossi, U. (2013). On the varying ontologies of capitalism: Embeddedness, dispossession, subsumption. *Progress in Human Geography*, 37(3), 348–365. <https://doi.org/10.1177/0309132512448548>
- Setiyono, B. (2014). Pemerintahan dan manajemen sektor publik: Prinsip-prinsip manajemen pemerintahan terbaik. CAPS.
- Skinner, C. (2008). Street trade in Africa: A review. WIEGO Working Paper No. 5. Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing. <https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Skinner-Street-Trade-Africa-WIEGO-WP5.pdf>
- Soenarto, E., & Kurniawan, T. (2020). Implementasi kebijakan relokasi PKL di kota-kota besar Indonesia: Antara regulasi dan realitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 112–128. <https://doi.org/10.22146/jsp.53892>
- Tokman, V. E. (2007). Modernizing the informal sector. UN Department of Economic and Social Affairs Working Paper No. 42. United Nations. https://www.un.org/esa/desa/papers/2007/wp42_2007.pdf
- Trebilcock, M. J., & Daniels, R. J. (2008). Rule of law reform and development: Charting the fragile path of progress. Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781848440494>
- Wibowo, H. A. (2022). Penertiban PKL dan implikasinya terhadap mata pencaharian: Perspektif kebijakan berbasis hak. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik*, 3(1), 1–15. <https://jppaap.unimuda.ac.id>
- Williams, C. C., & Nadin, S. (2012). Tackling the hidden enterprise culture: Government policies to support the formalization of informal entrepreneurship. *Entrepreneurship and Regional Development*, 24(9–10), 895–915. <https://doi.org/10.1080/08985626.2012.742325>
- Yusuf, M., & Hermawan, D. (2021). Pendekatan komunikatif dalam penertiban PKL: Studi di kawasan perkotaan Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(1), 45–62. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.5678>.